



Lima Kabupaten, Wagub Minta Carikan Lahan

Tingkatkan IPM, Pemprov akan Bangun Sekolah Unggulan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dimilai memiliki visi misi untuk membuat program sekolah unggulan tingkat SMA-SMK. Tahun ini bakal diwujudkan. Akan ada sekolah unggulan yang tersebar di lima kabupaten. Termasuk salah satunya, Kapuas Hulu.

ARIEF NUGROHO, Putussibau



ARIEF NUGROHO/PONTIANAKPOST

WAKIL Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan pun mengapresiasi kepermimpinan Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kalbar.

Menurutnya, ini yang pertama kali diperoleh oleh Kapuas Hulu. "Selamat kepada Kabupaten Kapuas Hulu karena sudah mendapatkan predikat WTP. Semoga bisa diperbahalkan," kata Ria Norsan dalam acara Ramah Tamah dengan masyarakat

◆ Ke Halaman 23 Kolom 5

RAMAH TAMAH: Wagub Kalbar H Ria Norsan saat ramah tamah dengan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu di rumah dinas Bupati Kapuas Hulu.



Lima Kabupaten, Wagub Minta Carikan Lahan

Sambungan dari halaman 17

Kapuas Hulu di rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Norsan juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki visi misi untuk membuat program sekolah unggulan tingkat SMA-SMK. Tahun ini akan ada sekolah unggulan yang tersebar di lima Kabupaten. Termasuk Kapuas Hulu.

"Jadi nanti Pemda silahkan cari lahannya, nanti Pemprov yang bangun. Tahun ini ada lima kabupaten," kata Norsan.

Menurutnya, pembangunan sekolah unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pendidikan.

"Anak-anak kita diberikan pendidikan gratis. Mudah-mudahan dengan pendidikan gratis ini bisa mengejar IPM yang masih rendah," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun infrastruktur untuk mewujudkan desa mandiri. Selama ini, baru satu desa mandiri yang ada di Kalimantan Barat, yakni berada di Kabupaten Kayong Utara.

"Untuk mewujudkan itu, perlu pembangunan yang merata. Infrastruktur dan lainnya. Target tahun 2020, ada 150 desa mandiri," bebernya.

Supaya target tercapai, kata Norsan, dirinya meminta kepala daerah untuk bisa bekerjasama dengan TNI dan Polri. Menurutnya, TNI/Polri memiliki program pengembangan masyarakat.

"Kami juga inginkan aparat pemerintah daerah bisa menyerap aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kendala," pungkasnya.
(*)